

**PERAN TOKOH AGAMA
DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT**

A. Muchaddam Fahham**

Abstract

This study examines the role of religious leaders in handling social conflict in Sambas, West Kalimantan. The results of the study reveal that the religious leaders were not directly involved to stop the conflict and its spread to neighboring areas. Different from this, in post-conflict phase, they play an active role in rebuilding social interaction by, for instance, holding regularly forum for dialogues between conflicting parties. Field research was conducted in August 2009 in several areas where the social conflict has taken place a few years ago.

Kata Kunci: Pendekatan Kultural, Pendekatan Keamanan, Tahapan Konflik, Akar Masalah, Kronologi Konflik.

* Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada tanggal 7 sampai dengan 13 Agustus 2009.

** Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: muchaddam@yahoo.com.

¹ Lambang Trijono ketika menelaah konflik Ambon berkesimpulan bahwa konflik Ambon Maluku sejatinya merupakan akumulasi tiga macam konflik: *Pertama*, Konflik politik yang bersumber dari soal pembagian kekuasaan politik lokal yang dinilai tidak adil oleh masing-masing komunitas akibat sentralisasi politik Indonesia tahun 1990-an. *Kedua*, konflik sosial-ekonomi yang bersumber dari pergeseran kekuasaan adat, politik komunitas, penguasaan sumber daya ekonomi terutama hak tanah adat sebagai akibat dari birokratisasi dan kapitalisasi pembangunan atau modernisasi pembangunan selama ini. *Ketiga*, konflik identitas kolektif antarkomunitas agama yang bersumber dari sikap saling curiga, prasangka, kurang komunikasi, akibat dari separasi komunitas Kristen dan Muslim di Maluku yang sudah berlangsung cukup lama sebagai warisan historis. Lambang Trijono, *Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 179.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berbagai konflik dengan beragam akar penyebabnya¹ yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa negeri ini memiliki potensi bagi lahirnya konflik di masa depan.² Karena itu, dibutuhkan penanganan konflik yang komprehensif dan tidak *ad hoc*. Salah satu hal yang perlu dicermati dalam konteks penanganan konflik adalah bagaimana konflik itu didekati tidak semata-mata berdasar *security approach* dan *political approach* tapi juga *cultural approach*. Sebab pendekatan keamanan dan politik bukan satu-satunya cara dalam penanganan konflik. Apalagi penanganan konflik tidak lagi sebatas ketika konflik terjadi, tetapi juga harus dilakukan pada saat sebelum dan sesudah konflik itu reda. Dalam kondisi demikian, pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh agama untuk penanganan konflik menjadi niscaya untuk dilakukan.³

Pelibatan tokoh agama dalam pendekatan kultural untuk menangani konflik bukan tanpa alasan yang kuat. *Pertama*, konflik pada umumnya tidak terjadi tanpa dukungan konteks interrelasi sosial yang mengitarinya. Dalam konteks seperti itu, tokoh agama umumnya merupakan aktor sosial yang menduduki posisi strategis yang dapat memobilisasi pihak-pihak yang berkonflik untuk bersama-sama menciptakan ruang damai sesuai dengan logika mereka sendiri atau bahkan mengobarkan konflik.⁴

Kedua, pendekatan keamanan dan politik yang melibatkan polisi-militer dan negara dalam penanganan konflik sejatinya diperlukan untuk menghentikan konflik agar tidak memakan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Pendekatan penanganan konflik ini hanya mampu menghentikan potensi konflik

² Secara detail majalah mingguan Tempo mendeskripsikan wilayah-wilayah konflik di Indonesia yang terbentang dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua dengan pemicu konflik yang beragam. Konflik Nanggroe Aceh Darussalam misalnya dipicu oleh ketidakpercayaan pada pemerintah, perampokan sumber daya alam, identitas Ke-Aceh-an, dan trauma kekerasan militer. Sementara di Sumatera Utara konflik dipicu oleh etnik, agama, pengungsi, dan akses terhadap sumber daya alam. *Tempo*, Edisi 14-20 Agustus 2006, h. 34-35.

³ Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Galtung bahwa strategi untuk mencapai perdamaian bukan merupakan tanggungjawab Negara, tapi merupakan tanggungjawab setiap orang. Lihat Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (Oslo: International Peace Research Institute, 1996), h. 7.

⁴ Penelitian Sri Yanuarti dkk, memasukkan tokoh agama sebagai salah unsur *civil society organization* (CSO) yang memainkan peran yang sangat besar dalam mempertahankan maupun memadamkan konflik di Maluku. Sri Yanuarti dkk, *Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku* (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 134.

terutama ketika konflik tersebut berada dalam kendali aparat keamanan dan negara, tetapi ketika kendali itu tidak ada, maka konflik mudah muncul kembali. Karena itu, penanganan konflik mesti melibatkan partisipasi masyarakat yang berkonflik agar mereka tidak selalu bergantung pada kondisi aman dan damai yang diciptakan oleh keamanan dan negara. Kondisi aman dan damai harus diciptakan oleh masyarakat dengan nalarnya sendiri. Dalam situasi itulah tokoh agama menemukan peran besarnya.

Ketiga, pendekatan keamanan dan negara dalam penanganan konflik mendapat banyak kritik karena cenderung gagal memahami kompleksitas konflik. Bahkan dalam kondisi tertentu, penggunaan pendekatan keamanan dan negara dalam penanganan konflik justru seringkali menjadikan konflik tambah semakin parah.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Seperti telah disebutkan, penanganan konflik tidak bisa hanya didasarkan pada pendekatan keamanan dan negara tetapi juga perlu didasarkan pada pendekatan kultural. Konflik sosial yang terjadi Sambas Kalimantan Barat merupakan konflik etnik yang berakar pada perbedaan latar budaya, sehingga penanganannya juga harus berdasar pendekatan budaya. Dalam penanganan konflik sosial yang didasarkan atas pendekatan kultural, pelibatan unsur yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan salah satu unsur masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah tokoh agama.

Persoalannya adalah bagaimana posisi tokoh agama dalam penanganan konflik sosial di Sambas. Berdasar masalah utama ini dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana peran tokoh agama dalam mengakhiri konflik?; (2) Bagaimana peran tokoh agama dalam membangun kembali interaksi sosial setelah konflik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan memahami peran tokoh agama dalam penanganan konflik sosial di Sambas Kalimantan Barat, terutama peran mereka dalam mengakhiri konflik, dan membangun kembali interaksi sosial pasca konflik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) penanganan konflik sosial.

D. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai, adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan (*incompatibility of goals*) pada para pihak yang terlibat dalam konflik, dan masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuan dimaksud,⁵ namun kadang disertai dengan upaya pihak yang satu untuk menyingkirkan pihak yang lain yang dianggap menjadi penghambat baginya dalam mencapai tujuan.⁶

Di sisi lain, konflik juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi di mana dua orang atau lebih menginginkan sebuah atau sejumlah sasaran atau obyek atau kepentingan, dan bahwa sasaran itu hanya bisa didapatkan oleh salah satu dari mereka, dan tidak oleh keduanya sekaligus. Ada juga yang mengartikan konflik sebagai situasi di mana dua pihak atau lebih berpendapat bahwa masing-masing memiliki kepentingan yang saling bertentangan (*incompatible goals*). Karena itu dalam konflik, terdapat: (a) ada dua pihak yang bersaing; (b) masing-masing pihak memobilisasi energi untuk mendapatkan sasaran (*goals*) tersebut; dan bahwa (c) masing-masing pihak menganggap pihak yang lain merupakan hambatan permanen (*barrier*) atau ancaman serius untuk mencapai sasaran yang hendak diperoleh sehingga perlu disingkirkan.

Dilihat dari sisi meningkatnya eskalasi konflik, Johan Galtung menyatakan bahwa konflik yang telah terjadi dapat meningkatkan eskalasinya karena adanya tiga hal yang saling terkait, yaitu *attitude*, *behavior*, dan *contradiction*. *Attitude* merupakan perbuatan yang menimbulkan kecurigaan dalam masing-

⁵ Konflik sebagai benturan antara gagasan-gagasan yang berbeda, antara sikap-sikap yang berbeda serta tindakan-tindakan yang berbeda tujuan dan kepentingan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam konteks kehidupan bersama manusia, bahkan konflik-konflik demikian justru agar kehidupan sosial berjalan dinamis. Yang tidak lumrah kemudian adalah ketiga benturan gagasan, sikap, dan kepentingan itu pecah menjadi konflik kekerasan fisik (*violent conflict*). Lihat Tamrin Amal Tamagola, "Anatomi Konflik Kamunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan 1998-2002," Makalah Seminar Nasional Sejarah: *Struktur dan Agensi dalam Sejarah*. Diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI di Depok, tanggal 08 Mei 2003.

⁶ Robert W. Baowollo, "Manajemen Konflik Berbasis Warga," Makalah disampaikan sebagai pengantar diskusi Model-Model Resolusi Konflik Berbasis Karakter Lokalitas yang diselenggarakan oleh Syarikat Indonesia di Pendopo Syarikat Indonesia, Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2009.

masing pihak berkonflik. Selanjutnya, adanya perilaku saling curiga itu menimbulkan, *behaviour*, yakni perbuatan baru yang dapat meningkatkan kualitas konflik. Kondisi itu, kemudian memunculkan rumor seputar konflik, rumor tersebut akan melahirkan apa yang disebut dengan kontradiksi, yakni pertentangan-pertentangan, jika pertentangan ini semakin melebar maka akan mematikan ruang kepercayaan satu sama lain. Jika hal itu terjadi, maka konflik yang terjadi akan sulit untuk diakhiri.⁷

Terlepas dari pengertian konflik di atas, masalah pokok yang perlu diketahui dalam konflik adalah bagaimana konflik itu diakhiri atau diselesaikan, di samping upaya pemahaman seputar akar penyebab konflik yang terjadi. Pertanyaan yang mengemuka dalam konteks penyelesaian konflik itu adalah bagaimana penanganan konflik itu didekati dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Resolusi konflik merupakan terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika konflik dikendalikan lewat resolusi konflik. *Pertama*, terjadinya suatu konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Penanganan konflik atau *conflict resolution* lazimnya dibedakan dari pengelolaan dan penyelesaian konflik. *Kedua*, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linier. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. *Ketiga*, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Keempat*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.⁹

⁷ Suwandono, "Konflik Poso dan Publik Trust," dalam *Republika Online*, 24 Januari 2007. www.republika.co.id.

⁹ Syamsul Hadi dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional* (Jakarta: CireS FISIP UI-Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 24-27.

Di sisi lain, ada juga yang berupaya membedakan antara manajemen, penyelesaian konflik dengan resolusi konflik. Manajemen konflik adalah kecapakan dalam mengelola sehingga konflik dapat ditampung dan dibatasi. Sedangkan penyelesaian adalah wewenang yang dimiliki untuk memaksa sebuah konflik untuk selesai. Baik mengelola maupun menyelesaikan konflik, pendekatan yang biasanya digunakan adalah struktural, sementara pihak yang terlibat dalam proses itu biasanya aktor-aktor yang terbatas hanya pada pemerintah dan aparat keamanan.

Resolusi konflik adalah upaya penghentian konflik secara analitis dan menyentuh dasar permasalahan dalam konflik. Pada konsepnya yang demikian, resolusi konflik, menurut Galtung, tidak berhenti pada upaya penanganan ketika konflik terjadi saja, atau ketika konflik telah selesai, tapi juga pada tahap sebelum konflik itu terjadi.¹⁰ Dengan kata lain, resolusi konflik adalah upaya penanganan konflik secara menyeluruh tidak terpisah-pisah. Ada tiga tahap resolusi konflik, *pertama* adalah tahap pra konflik, yakni bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan sosial yang aman dan damai, *kedua*, tahap konflik, yakni bagaimana pemerintah, sektor swasta, masyarakat terlibat dalam penghentian dan penanganan konflik, sementara tahap *ketiga* adalah, bagaimana ketiga aktor terlibat dalam penanganan pasca konflik: rekonsiliasi dan *recovery*.

Menurut Kriesberg proses resolusi konflik dapat dibagi menjadi empat tahapan yang meliputi: (1) tahap deeskalasi konflik; (2) tahap negosiasi; (3) tahap *problem solving approach*; (4) tahap *peace building*.¹¹

Tahap *pertama*, de-eskalasi konflik, pada tahap ini konflik yang terjadi masih diwarnai dengan pertikaian bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus begandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dalam tahap ini dapat dimulai jika didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

¹⁰ Suwandono, "Konflik Poso dan Publik Trust," dalam *Republika Online*, 24 Januari 2007. www.republika.co.id.

¹¹Sri Yanuarti, "Penanganan Konflik Sosial di Indonesia," Artikel diskusi bersama Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 13 Mei 2009.

Kajian tentang de-eskalasi konflik menurut Yanuarti masih didominasi oleh pendapat Zartman tentang kondisi *hurting stalemate*. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai akan lebih terbuka kepada opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat dan untuk menghindari kehancuran total.

Tahap *kedua*, yakni negosiasi hanya dapat dilakukan ketika tahap de-eskalasi konflik sudah terjadi atau bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik, untuk membuka peluang diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik antar aktor yang berkonflik.

Tahap *ketiga*, yakni *problem solving approach*, diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi.

Transformasi konflik dapat disebut berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Dengan mengutip pendapat Burton, Yanuarti menyatakan bahwa sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh. Dengan demikian, proses resolusi konflik harus berhadapan dengan suatu realitas sosial yang kompleks dan tidak hanya melakukan usaha-usaha *ad-hoc* untuk mengendalikan suatu dimensi interaksi sosial spesifik yang menyukai kekerasan.

Tahap *keempat*, (*peace building*) meliputi tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahapan ini merupakan tahapan terberat dan memakan waktu yang lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.

Pada tahap transisi ini *governance-based approach* merupakan suatu pendekatan yang dominan digunakan selama ini. Pendekatan ini sangat menekankan tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan *civil society*, sembari menempatkan pembentukan institusi demokrasi dan pelaksanaan HAM sebagai prioritas utama.

Tahap *pertama* dari *peace building* adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang dialami suatu komunitas telah menimbulkan kerapuhan kohesi asal masyarakat karena beragam kekerasan

struktural yang terjadi dalam sejarah komunitas tersebut. Rekonsiliasi sendiri, dapat didefinisikan sebagai pemulihan kembali kesucian masyarakat yang telah ternoda oleh tindakan-tindakan kekerasan. Rekonsiliasi bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai dengan jalan menghilangkan penghalang antara kedua pihak untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama tentang masa depan mereka. Dari definisi itu diketahui bahwa proses rekonsiliasi baru bisa dilakukan jika sudah ada proses de-eskalasi konflik.

Tahap penting dari proses rekonsiliasi adalah perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun harus kembali ditekankan bahwa rekonsiliasi bertujuan untuk mencatat sejarah hitam suatu bangsa/masyarakat dan kemudian menjadikannya sebagai kekuatan baru untuk membentuk masa depan bersama. Dengan demikian, perwujudan rasa keadilan ditujukan untuk memberikan jaminan hukum terutama untuk mencegah terulangnya pemakaian kembali tindak kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan antar kelompok. Proses rekonsiliasi ini dapat dikatakan berhasil jika pihak-pihak yang bertikai secara sama-sama memandang penderitaan yang selama ini dialami oleh masing-masing kelompok sebagai pengorbanan yang memang diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi bangsa. Dengan kata lain, kedua kelompok berhasil merubah *destructive conflict* yang terjadi selama ini menjadi *constructive conflict* yang tidak akan lagi menjadikan kekerasan sebagai sarannya.

Tahap berikutnya dari proses *peace building* adalah tahap konsolidasi perdamaian. Upaya ini dapat dilakukan dengan merumuskan hubungan antara masyarakat dengan negara dimana terbuka kesempatan bagi pihak yang semula bertikai untuk menyelesaikan konflik. Untuk itu, perlu diberdayakan lembaga-lembaga administrasi negara, penegak hukum dan jasa sosial. Erat kaitannya dengan dimensi politik-kekuasaan adalah kebijakan keamanan, konkretnya adalah demiliterisasi konflik lewat pendidikan, pengawasan, persenjataan, dan penataan ulang hubungan sipil-militer.

Namun demikian dalam praktek dan implementasi upaya konsolidasi perdamaian mencatat banyak permasalahan dan kekurangan. *Pertama*, sifat politis proses konsolidasi perdamaian sering dilupakan atau dianggap enteng. Padahal tidak ada satupun pelaksanaan kegiatan bersifat netral dalam dampaknya. Karena itu, harus diperhatikan pendekatan birokratis teknokratis yang mengandung dampak kontra produktif terhadap tujuan konsolidasi perdamaian. Sebaliknya, bila diperlukan harus ada *pressure* dari pihak-pihak yang bertikai dalam mediasi.

Kedua, kenyataan di lapangan, kebanyakan kebijakan perdamaian biasanya dikeluarkan oleh penguasa. Selama ini, proses perdamaian yang dilakukan penguasa memakai pendekatan *topdown* yang melibatkan politisi, panglima, tokoh perang, tokoh agama dan suku dalam bingkai konferensi diplomasi perdamaian yang sifatnya seremonial. Upaya diam-diam dan *bottom-up* yang dilakukan LSM, misalnya sering kurang diperhatikan. Dalam banyak kasus penguasa bahkan terpaksa bekerja sama dengan tokoh, kelompok atau institusi yang bisa dikategorikan "penjahat perang atau pembantai massal". Meski menurut pertimbangan riil politik, hal ini bisa menjamin keamanan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan berdampak kontra produktif bagi proses perdamaian.

Ketiga, sulitnya memenuhi kebutuhan pendanaan pasca kerusuhan, serta adanya beberapa aspek yang harus dipertimbangkan matang, misalnya apakah hasil dari "investasi" (waktu, dana, SDM) yang selama ini ditanam dalam proses perdamaian? Upaya apa yang harus dilakukan dan mana saja yang telah berlangsung secara optimal? Apa saja harga (finansial dan politik) dari berbagai kegiatan itu?

Keempat, proses konsolidasi perdamaian bukan sesuatu proses perbaikan yang berlangsung sekejap (*quick fix*), tetapi memerlukan nafas panjang, apalagi yang berkaitan dengan rekonstruksi dan pembaharuan masyarakat atau bahkan pembaharuan negara pasca konflik yang destruktif. Namun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisir apabila kedua komunitas yang bertikai mampu merancang dua kegiatan. *Pertama* adalah mengoperasikan indikator sistem peringatan dini (*early warning system*). Indikator tersebut harus terkait dengan variasi sumber konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik.

Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor non-militer di berbagai tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat berupa *non-governmental organization* (NGO), mediator lokal, nasional dan internasional atau institusi keagamaan.¹²

¹² Sri Yanuarti, *Konflik Maluku Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004), h. 17

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 7 sampai 13 Agustus 2009. Alasan utama mengapa Kabupaten Sambas dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kabupaten inilah konflik antara etnis Melayu dengan etnis Madura pernah terjadi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini didapatkan melalui: (1) studi dokumentasi, dan (2) wawancara mendalam. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan penanganan konflik, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil kajian tentang konflik. Sementara wawancara mendalam dilakukan dengan informan penelitian, yang meliputi pakar di bidang konflik, tokoh agama yang mengetahui dan ikut terlibat aktif dalam penanganan konflik Sambas, tokoh agama tersebut bisa berasal dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Tokoh agama Bisa juga berasal dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat ketika konflik berlangsung maupun ketika konflik telah berakhir. Lembaga-lembaga itu antara lain, Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM), Ikatan Generasi Muda Islam (IGMI).

C. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sementara analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Aktifitas dalam analisis data, meliputi *data reduction*,¹³ *data display*¹⁴ dan *conclusion*.¹⁵

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum mendeskripsikan peran tokoh agama dalam penanganan konflik sosial, terlebih dahulu penulis menguraikan secara umum tentang konflik sosial di Sambas yang meliputi gambaran umum konflik, akar masalah konflik, dan kronologi konflik yang terjadi pada tahun 1999 itu.

A. Gambaran Umum Konflik di Sambas Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang tentang konflik etnik.¹⁶ Menurut Henny Warsilah dan Dede Wardiat, sejak tahun 1950-an hingga tahun 2000-an telah terjadi sekitar 12 kali konflik kekerasan antar etnis. Dalam perjalanan sejarah konflik itu selalu dipicu oleh peristiwa sepele seperti perkelahian antar pemuda, antar warga, masalah tanah, senggolan antara bus dengan motor, tersenggol pada saat menonton hiburan rakyat, dengan mudah meledak menjadi konflik kekerasan yang kemudian menyulut konflik yang lebih luas. Kerusakan sosial seringkali diawali dari suatu tindakan kriminal murni, terjadinya pelanggaran nilai-nilai atau norma-norma adat istiadat/kebiasaan dari suatu etnis.¹⁷

¹³ Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Lihat Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.

¹⁴ *Ibid.*, h. 7. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan ditampilkan pada laporan akhir penelitian.

¹⁵ *Ibid.*, h. 19. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

¹⁶ Heru Cahyono, *Resolusi Konflik Etnis di Sambas*, (Jakarta: LIPI, 2006), h. 81

¹⁷ Henny Warsilah dan Dede Wardiat, "Akar Permasalahan dan Strategi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," dalam Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi ilmiah LIPI, 2006), h. 1-75

Beberapa kerusuhan sosial di wilayah Kalimantan Barat, konflik sosial antara etnis Melayu dan Madura pada tahun 1999, merupakan konflik yang hingga penelitian ini dilakukan masih menyisakan masalah yang cukup serius. Konflik yang terkenal dengan Tragedi Parit Setia ini meskipun telah selesai tapi interaksi antara kedua etnis yang terlibat konflik belum juga terbangun secara harmonis. Etnis Melayu masih belum bisa menerima kehadiran kembali etnis Madura di Sambas. Dan konflik ini memakan korban yang tidak sedikit.¹⁸

Secara kronologis, kerusuhan antara suku Melayu dengan suku Madura pada tahun 1999, terjadi dalam tiga fase. Fase *pertama*, dipicu oleh usaha pencurian oleh seorang warga Madura sehingga mendorong kelompok Madura melakukan penyerangan dan pembunuhan pada hari Idul Fitri 1419 H. Fase *Kedua* dipicu oleh penusukan yang dilakukan oleh warga Madura terhadap warga Melayu di Semparuk sehingga menyebabkan pembakaran rumah di Kecamatan Jiwai dan Pemangkat. Fase *ketiga*, dipicu oleh kematian orang Dayak yang dilakukan oleh oknum Madura sehingga menyebabkan konflik kekerasan yang menyebar dan meluas di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.¹⁹

B. Akar Masalah

Faktor pemicu pertikaian antar etnis di Kalimantan Barat menurut Henny Warsilah dan dan Dede Wardiat, hampir seluruhnya disebabkan oleh tindakan kriminal. Kasus Sanggau Ledo tahun 1997 dipicu oleh perkelahian antara warga Madura dengan warga Dayak. Kasus Parit Setia dipicu oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga Madura terhadap Melayu. Faktor pemicu lainnya yang mengakibatkan meluasnya kerusuhan Sambas 1999, antara lain: (1) adanya provokasi dari pihak Madura yang menyatakan Melayu Panakut dan Melayu Kerupuk; (2) Pengiriman bagian-bagian tubuh manusia oleh sebagian pelaku di wilayah Pemangkat dan Tebas kepada sesama Melayu pada konflik fase kedua ke wilayah Sambas; (3) pernyataan-pernyataan dari tokoh informal kedua belah pihak yang saling menyalahkan satu sama lain sehingga memotivasi kedua pihak untuk melakukan tindak kekerasan; (4) koersivitas atau tekanan dari aparat keamanan dalam menangani massa yang sedang marah dan dirasakan tidak adil bagi pihak-pihak yang bertikai seperti melucuti senjata api

¹⁸ Heru Cahyono, *Resolusi Konflik Etnis di Sambas*, h. 88

¹⁹ Henny Warsilah dan Dede Wardiat, "Akar Permasalahan dan Strategi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi ilmiah LIPI, 2006), h. 1-75.

milik kelompok etnis Melayu di Sengkawang atau penembakan para demonstran oleh pasukan PPRM/PPH.²⁰

Akar masalah terjadinya kerusuhan antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:²¹

1. Perbedaan Budaya

Kemajemukan dan heterogenitas budaya masyarakat di Kalimantan Barat merupakan faktor yang berperan cukup besar dalam terjadinya pertikaian antar etnis di wilayah ini. Karena kemajemukan dan heterogenitas itu, maka tidak ada budaya dominan sebagai wadah pembauran dari masing-masing etnis yang ada. Hampir seluruh pertikaian antar etnis, khususnya antara Dayak dengan Madura, Melayu dengan Madura disebabkan oleh adanya faktor perbedaan budaya antara pendatang baru Madura di satu pihak dengan Dayak dan Melayu di pihak lain. Masih kuatnya kebiasaan di daerah asal Madura dapat menimbulkan kerisauan pada masyarakat setempat. Perbedaan pandangan dari segi budaya semacam ini tampak menjadi benih ketidaksesuaian dalam hubungan sosial antara mereka dengan penduduk setempat. Perbedaan tersebut juga diperuncing dengan pola hubungan etnis yang mengarah pada stereotip antar etnis.²²

Lemahnya adaptasi nilai-nilai budaya setempat ditambah lagi dengan pola-pola permukiman yang mengelompok oleh suku Madura dianggap telah memperuncing perbedaan yang ada di antara suku-suku asli. Sebagai migran, etnis Madura dianggap gagal melaksanakan proses adaptasi terhadap lingkungan setempat. mereka praktis telah melanggar norma umum bahwa sebagai pendatang harus menghayati dan menghormati adat-istiadat setempat, sebab tanpa ini mustahil memunculkan rasa senasib antara penduduk asli dan kaum pendatang.²³

Jika diperhatikan secara cermat, faktor sosial budaya dianggap sebagai faktor utama terjadinya konflik sosial di Kabupaten Sambas. Perbedaan kultur etnis Madura dan Melayu secara persis diuraikan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, h. 1-75.

²¹ *Ibid.*, h. 1-75.

²² Benturan budaya sebagai akar masalah dalam konflik etnis di Kab. Sambas juga dikemukakan oleh beberapa informan penelitian ini dalam wawancara yang dilakukan dengan MUI Kab. Sambas dan Dinas Kesehatan Kab. Sambas pada tanggal 09 Agustus 2009.

²³ Henny Warsilah dan Dede Wardiat, "Akar Permasalahan dan Strategi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi ilmiah LIPI, 2006), h. 1-75.

Agama

Meskipun sama-sama memeluk agama Islam terdapat perbedaan kedua etnis itu dalam menjalankan ajaran Islam. Etnis Madura, dalam menjalankan ajaran agama cenderung tertutup: membangun sarana ibadah di lingkungan permukiman etnis Madura sendiri, hal ini menyulitkan terciptanya komunikasi antar etnis. Sementara etnis Melayu dalam menjalankan ajaran agamanya bersifat terbuka, sehingga terjadi interaksi sosial dengan etnis lain yang sama-sama pemeluk agama Islam sehingga etnis Melayu tidak pernah mengalami konflik sosial dengan etnis lain yang sama-sama pemeluk agama Islam.

Adat

Bila terjadi perselisihan antara etnis Madura dengan etnis Melayu selalu diakhiri dengan kekerasan, baik dalam bentuk penganiayaan maupun pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok. Sebaliknya, untuk menyelesaikan perselisihan, etnis Melayu melakukannya secara jantan apabila sudah terdesak atau melalui proses hukum formal di pengadilan. Etnis Madura selalu membawa senjata tajam (clurit) bila bepergian, dan dijadikan senjata pembunuh bila terjadi perselisihan atau perkelahian. Sementara etnis Melayu tidak membawa senjata tajam bila bepergian ke mana-mana, sehingga jarang etnis Melayu melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Pola Permukiman

Di Kabupaten Sambas, etnis Madura membentuk pola permukiman sendiri, cenderung eksklusif, tidak berbaur dengan etnis lain, dan cenderung hidup mengelompok dengan sesama Madura. Dalam pola permukiman yang seperti itu, etnis Madura mendirikan Masjid, mushalla, sekolah, serta pesantren yang diperuntukkan bagi kelompok mereka sendiri. Guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan itu mereka mendatangkan guru dari Madura. Berbeda dengan etnis Madura, pola permukiman etnis Melayu bertolak belakang dengan permukiman etnis Madura: inklusif, membaur dan terbuka dengan etnis lainnya.²⁴

²⁴ Parsudi Suparlan dalam wawancara dengan majalah mingguan D&R tanggal 3-8 Mei 1999. Benturan budaya sebagai salah satu faktor penyebab kerusuhan juga disampaikan oleh perwakilan Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kab. Sambas, dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Agustus 2009.

Pendidikan

Harus dikatakan bahwa pendidikan etnis Madura yang ada di Kabupaten Sambas relatif buruk, etnis ini tampaknya lebih mengutamakan bekerja dan enggan bersekolah. Jika ada yang bersekolah lebih banyak dilakukan pada sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh kelompok-kelompok Madura seperti pesantren. Sementara bagi etnis Melalyu, pendidikan jauh lebih baik di mana tingkat pendidikan anak-anak mereka sampai pada tingkat SMU dan bahkan banyak di antara orang tua menyekolahkan anaknya sampai ke universitas.

2. Kriminalitas dan Penyerobotan Tanah

Tindakan kriminal dan kekerasan, baik dalam bentuk penganiyaan atau pembunuhan merupakan sebagian besar faktor pemicu pertikaian antar etnis dalam sejarah konflik di Kalimantan Barat. Tindak kekerasan biasanya dilakukan oleh dan terhadap suku-suku yang berlainan, sehingga ini dipersepsikan sebagai pembunuhan kelompok yang satu terhadap yang lainnya, meskipun disinyalir kemungkinan adanya provokator yang turut menyulut dan memperluas skala konflik.

Sebagai penduduk migran, etnis Madura di bidang ekonomi dikenal sebagai *aggressor* yang pandai mencaplok hak-hak ekonomi rakyat setempat. Masyarakat Madura Sambas dengan agresivitasnya dalam persaingan ekonomi tidak jarang menggunakan cara-cara tidak jujur, pemaksaan dengan tekanan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Termasuk penyerobotan tanah-tanah pertanian dan perkebunan milik penduduk setempat.²⁵

C. Kronologi Konflik

Pada tanggal 17 Januari 1999 (tiga hari menjelang hari Raya Idul Fitri) terjadi penangkapan dan pengeroyokan terhadap Hasan (27 tahun) warga Madura dari desa Sari Makmur.²⁶ Oleh warga desa Hasan tertangkap tangan saat hendak melakukan pencurian di rumah Achmad di Dusun Setia Dharma,

²⁵ Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab. Sambas, tanggal 10 Agustus 2009.

²⁶ Wawancara dengan MUI Kabupaten Sambas, tanggal 9 Agustus 2009.

Desa Parit Setia.²⁷ Kejadian malam itu, meskipun telah melalui berbagai upaya perdamaian, akhirnya berlanjut menjadi sebuah kerusuhan yang berkepanjangan. Walaupun pada awalnya percikan api ini masih dapat diatasi dan diredam karena ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti misalnya warga yang bertikai menyerahkan persoalan melalui upaya "hukum" dengan cara menyerahkan persoalan itu untuk diselesaikan secara hukum yaitu melalui aparat kepolisian agar menangkap mereka yang terlibat. Upaya pertama ini tampaknya kurang membuahkan hasil yang optimal terbukti dari beberapa situasi dan kejadian lanjutan sebagai berikut:²⁸

Kedua semakin meruncing setelah keesokan harinya Hasan diserahkan ke Polsek Jawai untuk diproses sesuai prosedur hukum. Pihak Madura tidak dapat menerima kondisi main hakim sendiri yang dilakukan warga desa Parit Setia (tiga pemuda yang mewakili warga desa Hasan mendatangi Polsek Jiwai, dan mereka protes bahkan mengancam akan balas dendam, dan Kepala desa Parit Setia diancam akan dibunuh). Hasan dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti material yang cukup untuk proses penyidikan, dan dia diperbolehkan pulang (setelah dirawat di Puskesmas Sentebang selama dua hari). Pihak keluarga marah melihat kondisi fisik Hasan, akhirnya sekitar 200 orang warga Madura dari desa Sari Makmur melakukan penyerangan terhadap warga Melayu di desa Parit Setia. Akibat penyerangan yang membabi buta, dua orang Melayu dan seorang suku Dayak (yang sudah masuk Islam) meninggal, dan dua orang anak korban kena luka bacok yang cukup parah.²⁹

Atas kebijaksanaan Kepala Desa Parit Setia (Sardjono Djuin) maka warga diminta untuk menyelesaikan pemakaman para korban dan masalah itu agar diserahkan pada pihak berwajib. Warga Melayu menuntut agar polisi mengusut tuntas pelaku kasus itu. Namun tanggapan yang diberikan oleh aparat kepolisian Polsek Jawai sangat "lamban" oleh karena itu warga melanjutkan perkara tersebut ke Kapolres dan Kapolda Kalbar. Karena desakan penduduk

²⁷ Menurut Henny Warsilah dan Dede Wardiat ada dua versi cerita tentang penangkapan warga Madura yang dilakukan oleh warga dusun Setia Dharma Desa Parit Setia. Pertama, versi Madura yang menjadi tersangka mengatakan bahwa warganya itu bukan bermaksud untuk mencuri, tetapi karena pulang kemalaman dari habis main dan minum-minum di pub (kondisi setengah mabuk) dia mencari tempat istirahat dan rebahan di teras rumah orang yang kebetulan orang Melayu. Kedua, versi Melayu mengatakan warga Madura hendak melakukan pencurian di rumah Ahmad. Lihat Henny Warsilah dan Dede Wardiat, "Akar Permasalahan dan Strategi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi ilmiah LIPI, 2006), h. 46.

²⁸ *Ibid.*, h. 46

²⁹ *Ibid.*, h. 46

dan juga untuk meredakan situasi yang semakin memanas, akhirnya aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap tujuh orang pelaku pengeroyokan di desa Parit Setia dan beberapa hari kemudian menangkap lagi empat orang pelaku. Tindakan ini untuk sementara cukup meredam ketidakpuasan masyarakat yang bertikai.

Kerusuhan memuncak kembali dan memunculkan kemarahan dari warga Melayu, karena ulah seorang bernama Kacong.³⁰ Kronologi Kejadiannya sebagai berikut:³¹

Pada tanggal 21 Februari, Rodi alias Kacong (Madura) naik kendaraan umum bu Triono dari Desa Sempadung menuju Tebas, dan sewaktu turun pergi begitu saja tidak mebayar ongkosnya, dan dia ditegur dan dipelototi oleh Bujang (Melayu) yang merupakan kernet dari mobil tersebut. Kacong merasa tersinggung dan sakit hati. Rodi pulang mengambil senjata tajam clurit dan kembali ke jalan menunggu kendaraan Bujang lewat. Pada saat kendaraan dihentikan oleh Kacong, Bujang datang menghampiri dan tidak disangka Rodi mengibaskan cluritnya hingga mengenai bagian celah ibu jari kanan dan lutut Bujang Lebig dan dilarikan ke rumah sakit Pemangkat. Isupun berkembang bahwa bujang mati dianiaya oleh Rodi yang Madura. Keadaan ini menyentak perasaan sedih dan emosi warga Pemangkat yang mayoritas warga Melayu. Pada tanggal 22 Februari 1999 sekitar jam 01.30 WIB, sekitar 300 orang Melayu mengepung rumah Rodi dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke Polsek Tebas.³²

Tetapi ternyata mendapat perlawanan, kedatangan warga Melayu ini disambut dengan tembakan senapan lantak (senapan rakitan), dan mengenai pelipis Hamsiar (Melayu). Berita ini penembakan ini cepat menyebar di kalangan warga masyarakat Melayu di Kecamatan Pemangkat, khususnya di Desa Semparuk. Stereotip etnik yang biasanya merupakan bahan "guyonan antar dua etnis yang berbeda" pada waktu itu berubah menjadi bahan ledakan dengan nada-nada melecehkan seperti "Melayu terkuyung, Melayu kerupuk" yang artinya Melayu penakut, pada saat kejadian malah memperbesar api kemarahan dari

³⁰ Henny Warsilah dan Dede Wardiat, "Akar Permasalahan dan Strategi Penanganan Konflik, h. 47. hal yang sama juga disampaikan oleh Muhanni Abdur dalam Wawancara tanggal 09 Agustus 2009.

³¹ Nyayu Fatima, "Konflik di Kalimantan: Arogansi Etnik atau Identitas Etnik yang Terusik?," dalam Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi ilmiah LIPI, 2006), h. 77-99.

³² *Ibid.*, h. 84.

warga Melayu. Tak dapat dielakkan lagi api permusuhan pun mulai berkobar dan merembet tanpa ada batas waktu.³³

Akibatnya maka terjadilah pembakaran terhadap rumah-rumah orang Madura (17 rumah habis terbakar) dan harta milik Madura seperti mobil, dan sapi habis dibakar. Selain itu, pembunuhan pun terjadi terhadap beberapa warga Madura sampai tanggal 24 Februari 1999, tercatat 30 rumah milik Madura habis terbakar.

Kejadian serupa berlangsung secara sporadis di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Sambas, yang diiringi dengan yel-yel "Melayu bukan penakut, Melayu bukan kerupuk, Melayu bukan Tengkujung." Kejadian tersebut terus berlangsung sampai sekitar bulan April 1999.³⁴

D. Peran Tokoh Agama dalam Proses Perdamaian di Sambas

Keterlibatan tokoh agama dalam proses perdamaian dalam konflik etnis di Sambas tampak dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan dalam lembaga maupun pertemuan-pertemuan yang digagas untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi dan membangun kembali interaksi sosial pasca-konflik di Sambas seperti terlihat berikut:

1. Peran dalam Mengakhiri Konflik

Konflik Sambas bukan konflik yang disebabkan oleh agama, konflik Sambas lebih merupakan konflik etnis.³⁵ Karena itu, peran tokoh agama dalam proses mengakhiri konflik sosial di Sambas tidak terlihat menonjol. Tokoh agama dari kedua pihak berkonflik melebur ke dalam lembaga-lembaga lokal yang dibentuk masyarakat ketika konflik sedang terjadi. Jadi keterlibatan mereka dalam mengakhiri konflik tidak terlihat sebagai tokoh agama tapi lebih terlihat sebagai tokoh masyarakat.

Menurut Heru Cahyono tokoh agama memiliki peran kecil tokoh dalam mengakhiri konflik. Bahkan ketika konflik terjadi tokoh agama tidak turun untuk mengakhiri konflik.³⁶ Hal demikian bisa jadi diakibatkan oleh pandangan kedua

³³ Pelabelan (*stereotype*), ini menurut wakil dari Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (FKPM), menjadi semacam hinaan terhadap etnik Melayu, karena itu mereka kemudian bangkit dan menyerang.

³⁴ Nyayu Fatima, "Konflik di Kalimantan: Arogansi Etnik atau Identitas Etnik yang Terusik?," dalam Glen Smith & Helena Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan*, h. 77-99.

³⁵ Wawancara dengan H. Darwis Muhtar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu, 9 Agustus, 2009.

³⁶ Heru Cahyono, *Resolusi Konflik Etnis di Sambas*, h. 117

etnis terhadap posisi tokoh agama. Bagi orang Madura, tokoh agama adalah mereka memiliki pengetahuan agama yang luas dan mendalam, dan bagi etnis madura ulama demikian berasal dari kampung mereka di Pulau Madura. Sementara bagi orang Melayu, tokoh agama, tidak memiliki posisi yang signifikan.³⁷ Bagi orang Melayu di Sambas, yang memiliki otoritas adalah pihak kerajaan Sambas dan tokoh adat. Karena itulah, dalam konflik Sambas peran tokoh agama tidak menonjol, meskipun tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki peran dalam membangun kembali interaksi sosial antara warga Melayu dan warga Madura pasca konflik.

Konflik yang sedang terjadi, dalam pandangan mereka juga harus diselesaikan secara informal dan alamiah. Campur tangan Negara, baik melalui aparat keamanan maupun melalui aparat Pemerintah Daerah, dalam upaya mengakhiri konflik kerap kali dipandang formalitas belaka dan tidak punya efek dalam penghentian konflik.

2. Peran dalam Membangun Kembali Interaksi Sosial Pascakonflik

Keterlibatan tokoh agama dalam membangun kembali interaksi sosial pasca konflik tergambar dalam beberapa hal berikut:

a. Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan

Pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2001.³⁸ Dihadiri oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat Kalimantan, diantaranya H. A. Fauzi Z. Bakhsin Kalimantan Tengah, Lewis KDR Kalimantan Tengah, H. Ridhoi Kalimantan Barat, A. Syaikun Riady Kalimantan Barat, H. Mansyah Addrian Kalimantan Selatan, Prof. KH. Aswadi Syukur Lc Kalimantan Selatan, Martinus F. Tennes Kalimantan Timur, Sudjarwo Kalimantan Timur, KH Bisri Abdul Jalil Jawa Timur, dan R.P. Moh. Noer Jawa Timur. Hasil dari pertemuan ini adalah deklarasi yang disebut dengan "Tekad Damai Anak Bangsa Di Bumi Kalimantan" yang isinya sebagai berikut: (1) Musyawarah Damai sepakat bertekad secara bulat dan utuh untuk menyelesaikan masalah di Bumi Kalimantan secara konseptual, komprehensif, integral, dengan dilandasi semangat i'tikad baik, bijaksana dan saling menghormati; (2) Musyawarah Damai

³⁷ *Ibid.*, h. 117

³⁸ Wawancara, Muhanni Abdur (tokoh agama), 9 Agustus 2009.

menjadi tekad sebagai entitas awal untuk menciptakan dan melaksanakan perdamaian di bumi Kalimantan; (3) Musyawarah Damai telah mengindikasikan akar masalah yang mendasar yang perlu ditangani dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik serta pelaksanaan yang baik, bukan sekedar reaksi terhadap suatu kasus yang hanya berakibat lebih buruk dan kontroversial, tetapi harus yang bersifat responsif yang harus dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh ikhlas secara lahir batin. Adapun akar masalah dari seluruh konflik yang dapat diidentifikasi meliputi: (a) Kebijakan Pemerintah yang kurang tepat di masa lalu; (b) proses pembinaan dan pemberdayaan manusia yang kurang berhasil di masa lalu; (c) Benturan budaya; (d) rasa ketidakadilan; (e) kemiskinan; (f) keamanan yang tidak kondusif; (g) ketidakpastian dalam penegakan hukum untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut Musyawarah sepakat akan adanya kesamaan prinsip dasar yang digunakan yaitu: (a) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia; (c) menerapkan filsafat “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”; (d) menjunjung tinggi semangat saling menghormati, beritikad dan berprasangka baik; (e) pengakuan dan penerapan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak tinggal di mana saja di seluruh wilayah republik Indonesia, termasuk Bumi Kalimantan; (f) para pengungsi yang ingin dan akan kembali ke Kalimantan diatur pelaksanaannya dengan seksama dan sebaik-baiknya melalui tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap rehabilitasi, sehingga baik pengungsi maupun warga di sekitar tempat kembali itu telah dapat dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, institusi sosial serta tokoh-tokoh masyarakat.

2. Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan

Seperti halnya Tekad Damai Anak Bangsa, pertemuan yang disebut dengan Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan, diinisiasi oleh Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 01-03 Februari 2002 di Batu Malang Jawa Timur. Dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral masyarakat, pemuka agama, pemuka adat dan generasi muda, secara rinci peserta pertemuan itu adalah: (1) Kalimantan Tengah 35 orang; (2) Kalimantan Barat 35 orang; (3) Kalimantan Timur 15 orang; (4) Kalimantan Selatan 15 orang; (5) Jawa Timur 25 orang.³⁹

³⁹ Wawancara, Muhanni Abdur dan MUI Kab. Sambas, 9 Agustus 2009.

Penyelenggaraan Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: Maksud: sebagai upaya final untuk menyamakan persepsi tentang arti pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.⁴⁰

Tujuan: (1) untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat di Kalimantan dan merealisasikan adanya kebhinekaan masyarakat yang sepakat memperkuat bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) merumuskan *action plan* yang mencakup: (i) deklarasi damai untuk Rakyat Kalimantan; (ii) berbagai produk peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian masalah; (iii) penanganan pengungsi, terutama jadwal tentatif pemulangan pengungsi.

Salah satu hasil pertemuan Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan adalah rumusan-rumusan berikut: (1) menerima pemulihan sosial sebagai wujud pengakuan hak warga negara Indonesia dapat tinggal di seluruh wilayah Indonesia atas dasar pandangan "di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung" dalam Sasanti Bhineka Tunggal Ika, yang prosesnya dimulai tahun 2002, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing; (2) mengharap Pemerintah segera membentuk peraturan Daerah yang aspiratif dan berpihak pada masyarakat secara adil untuk mewujudkan kerukunan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat; (3) mengharap Pemerintah segera melaksanakan langkah-langkah dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kalimantan dalam semua aspek kehidupan; (4) bersama seluruh komponen bangsa mewaspadaikan dan memerangi provokator dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan harmoni sosial dan budaya; (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan sebagai mediator dalam menciptakan harmoni sosial dan budaya antar pihak yang bermasalah, serta berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan penyelesaian masalah untuk pemulangan kembali, pemberdayaan dan relokasi sesuai dengan kebijakan Nasional; (6) diharapkan dapat membentuk lembaga kepolisian setingkat Polsek di tempat relokasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban, disertai pengamanan swakarsa oleh masyarakat; (7) untuk merealisasikan butir-butir di atas direkomendasikan segera dibentuk POKJA lintas tokoh dan sektor, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tekad musyawarah Kalimantan tersebut ditanda tangani, untuk dilaksanakan secara bertahap sampai akar rumput yang berada di bawah SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP, kegiatan

⁴⁰ Wawancara, Muhanni Abdur dan MUI Kab. Sambas, 9 Agustus 2009.

Pokja didukung dengan anggaran yang dibebankan kepada APBD, APBN dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁴¹

Meskipun pertemuan ini telah menghasilkan “kebulatan tekad” untuk mewujudkan perdamaian di Sambas. Beberapa kalangan menilai bahwa pertemuan ini gagal merealisasikan “kebulatan tekad” tersebut pada tataran akar rumput. Sebab yang terlibat dalam pertemuan bukan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik. Dengan kata lain, pertemuan tersebut bersifat elitis sehingga gagal dipahami oleh pihak-pihak berkonflik.⁴²

3. Dialog Antar Tokoh dalam Rangka Membangun Integrasi Bangsa

Dialog ini diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah bekerjasama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang, di Hotel Mahkota Singkawang pada tanggal 13 Juni 2002, dihadiri 75 orang peserta dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat, tokoh yang mewakili etnis, agama, birokrasi, generasi muda dan intelektual.

Dialog tersebut menghasilkan butir-butir rumusan sebagai berikut: *Pertama*, tentang keindonesiaan: (1) Keindonesiaan adalah sebuah proses yang disumbang dari berbagai faktor yang dimunculkan dari kemajemukan suku bangsa dan budaya; (2) mewujudkan Indonesia yang merdeka ialah untuk meningkatkan kehidupan bersama dan kesejahteraan yang baik dan berkeadaban serta kehidupan bangsa dan individu yang cerdas dan tercerahkan; (3) ingatan kolektif atau sejarah memperlihatkan bahwa mobilitas penduduk dalam skala kecil dan besar adalah bagian dari dinamika sejarah masyarakat bangsa Indonesia, yang heterogen dalam proses akomodasi sehingga membentuk corak masyarakat baru. *Kedua*, permasalahan Makro: (1) selama 40 tahun Indonesia mengalami hegemoni negara dalam sistem politik dan sebagainya termasuk wacana dan “ingatan kolektif”. Sistem sentralistik mengakibatkan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada pusat, ketika pemerintah pusat mengalami krisis pemerintah daerah tidak berdaya; (2) Mitos “persatuan dan kesatuan bangsa” dalam masa Orde Baru telah menyebabkan ketergantungan masyarakat yang berlebihan pada negara, dan pelemahan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri; (3) birokrasi kepemimpinan mengakibatkan

⁴¹ Wawancara, Muhanni Abdur dan wakil dari Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kab Sambas, MUI Kab Sambas, 9 Agustus 2009.

⁴² Nyayu Fatimah, *op.cit.* h. 93-99.

melemahnya sistem kepemimpinan lokal dan menafikan demokrasi; (4) kekuasaan negara yang berlebihan juga berakibat *living space* menjadi sempit dan persaingan antar komunitas suku bangsa dengan mudah mengembangkan primordialisme yang mematahkan hubungan antar suku bangsa. *Ketiga*, permasalahan mikro: (1) persaingan untuk memperoleh sumber daya ekonomi, sosial, politik yang dilakukan secara tidak adil; (2) berkembang pemahaman dari *stereotype* dan prasangka sehingga tidak ada saling percaya dalam hubungan sosial. Yang dipercaya adalah kerabat dan suku bangsanya sendiri.; (3) kemunculan konflik antar suku bangsa yang disebabkan oleh antara lain tidak diterapkannya hukum secara adil dan beradab.

Dialog ini kemudian merekomendasikan dua belas hal: (1) memaknai kembali makna kemerdekaan dan keindonesiaan, sebagai orientasi bangsa kepada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama, untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Perlunya pemberdayaan masyarakat lokal sehingga melahirkan pemimpin lokal yang dapat menjembatani hubungan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat lokal dan sebaliknya; (3) perlu dikembangkan pendidikan dan sikap multikultural, yang mengakui perbedaan dan menjunjung tinggi kesederajatan.; (4) konflik antaretnis, dapat dicegah apabila dikenali gejala-gejalanya sebelum terjadi. Perlu dikembangkan tanda sistem peringatan dini; (5) pemupukan kehidupan yang demokratis dan pemberdayaan masyarakat madani dapat diwujudkan melalui upaya penciptaan sistem politik transisi dan pendidikan, sebagai prasyarat untuk menghindari konflik terbuka. Masyarakat madani memerlukan dukungan hukum, politik, pengadaan infrastruktur fisik dari pemerintah; (6) rujuk damai yang merupakan sarana untuk menghilangkan dendam dan sakit hati dapat diwujudkan dengan kemauan bersama dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk penataan pranata sosial. Dengan menerapkan hukum yang adil dan untuk itu diperlukan keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak dan ada kepercayaan masing-masing pihak mendapat keuntungan sosial dan moral; (7) pemahaman mengenai kenyataan bahwa masyarakat Indonesia berciri majemuk (*bhineka*), yang berkehendak hidup bersatu dan saling bersikap terbuka perlu selalu dibina; (8) kekuatan-kekuatan politik dan pemerintah dianjurkan agar melakukan pendidikan politik yang meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara/bangsa dalam menegakkan kehidupan bersama; (9) perlu dibangun untuk saling memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan di antara suku bangsa dan kebudayaannya; (10) hukum positif negara akan lebih dirasakan sebagai landasan keadilan bila didampingi pula oleh pemahaman akan hukum adat; (11)

perlu dibentuk forum antar etnis yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan antar suku bangsa. Dan penyelesaian masalah yang timbul atas dasar kesadaran mereka sendiri; (12) perlu dibentuknya langkah-langkah yang secara khusus untuk menangani masalah konflik Sambas dan dampak-dampaknya.⁴³

4. Forum Mediasi Melayu-Madura

Forum mediasi Melayu-Madura adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalimantan Barat untuk mewujudkan perdamaian antara etnis Melayu dan Madura yang sedang berkonflik di Sambas Kalimantan Barat. Forum ini dikoordinatori oleh Zulydar Zaidar Muchtar. Kegiatan utama forum ini adalah membangun kembali perdamaian antara etnik Melayu dan Madura melalui serangkaian pertemuan-pertemuan antara kedua etnik, di samping itu, forum ini juga berupaya melakukan kerja-kerja sosial pasca konflik Sambas, seperti melakukan kerjasama dengan Badan kesbang Linmas Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu rehabilitasi korban konflik sosial.⁴⁴

Ada dua pertemuan utama yang dilakukan Forum Mediasi Melayu-Madura untuk menginisiasi perdamaian pasca konflik Sambas, yaitu:

Pertama, 03 Agustus 2002, Forum Mediasi Melayu-Madura, mengadakan Silaturahmi etnis Melayu dengan etnis Madura, pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan adat Melayu dan Madura. Dari etnis Melayu diwakili oleh ketua IGMI Kab. Sambas, ketua PFKPM Kab. Sambas, ketua MABM Kab. Sambas, sementara dari etnis Madura diwakili oleh ketua Himma/Pemuda, Ketua YKKSS, dan IKBM Prop. Kalbar. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut: (1) Bahwa etnis Madura dan etnis Melayu Sambas sama-sama menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan dan kejadian masa lalu yang tidak perlu terulang kembali dan menjadi suatu koreksi di masa datang; (2) Bahwa untuk sementara ini etnis Madura maupun etnis Madura keturunan yang ingin pulang ke Kabupaten Sambas dapat bersabar melakukan pembauran dengan proses alami; (3) Bahwa etnis Madura dan etnis Melayu Sambas sama-sama melakukan pola pembinaan dan sosialisasi jangka pendek dan jangka panjang dengan

⁴³ Wawancara, Muhanni Abdur dan MUI Kab. Sambas, 10 Agustus 2009.

⁴⁴ Zulydar Zaidar Muchtar, *Mediasi Melayu-Madura: Menelusuri Jejak Perdamaian Sampai Temuan Media Tradisional*. Pontianak: Romeo Mitra Grafika, 2009), h. 33.

membentuk program ke-2 (dua) wilayah etnis yang dijembatani oleh Pemerintah Daerah, Polda Kalbar, dan Forum Media; (4) Bahwa apakah masyarakat dapat menerima pertemuan bersifat terbuka yang akan diumumkan kepada masyarakat, media cetak, dan elektronik setelah penyampaian hasil ke-2 (dua) etnis dalam bentuk pertemuan atau evaluasi; (5) bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dapat memfasilitasi silaturahmi jangka pendek dan silaturahmi jangka panjang menuju silaturahmi perdamaian.⁴⁵

Kedua, lima tahun setelah penandatanganan kesepakatan antara etnis Melayu dan Madura, tepatnya, pada tanggal 03 Agustus 2002, Forum Mediasi kembali membangun komunikasi antar dua kelompok Melayu dan Madura. Dimulai dari pertemuan kecil etnik Melayu pada tanggal 09 Oktober 2007 di Istana Atzwakoebillah Sambas. Hadir dalam pertemuan ini adalah Pangeran Ratu H. Winata Kusuma, Pangeran Ratu Drs. Gusti Suryansyah M.Si, Kabag Linmas Provinsi Kalimantan Barat, Walikota Singkawang, Ketua Majelis Adat dan Budaya Melalyu, Ketua Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKM) Kalimantan Barat Kab. Sambas, pengurus Ikatan Generasi Muda Islam (IGMI) dan tokoh-tokoh masyarakat Sambas. Dari pertemuan kecil itu, kemudian dilakukan pertemuan besar antara perwakilan etnis Melayu dan Madura Kalimantan Barat, pertemuan itu rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2007, dan dihadiri oleh pihak Melayu yang diwakili antara lain oleh: (1) Pangeran Ratu H. Winata Kusuma; (2) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) kabupaten Sambas; (3) Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKM); (4) Ikatan Generasi Muda Islam (IGMI), sementara dari pihak Madura diwakili antara lain oleh: (1) Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) kabupaten Sambas; (2) Yayasan Korban Kerusakan Sosial Sambas (YKKSS) Provinsi Kalimantan Barat; (3) Pemuda Madura Provinsi Kalimantan Barat; dan (4) Himpunan Mahasiswa Madura (HIMMA).

Pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan dengan tema "Silaturahmi dari hati ke hati" tersebut menyepakati hal-hal berikut:

1. para pihak bersepakat, memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah, TNI-POLRI untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan menindak secara tegas para pelanggar hukum guna menegakkan supremasi hukum.

⁴⁵ *Ibid.*, h.33.

2. para pihak bersepakat, melakukan perdamaian untuk menghilangkan rasa permusuhan, dendam, dan praduga negatif yang dapat mengakibatkan merugikan para pihak, masyarakat daerah, Bangsa, dan Negara.
3. para pihak bersepakat, saling memaafkan terhadap kesalahan dan kejadian masa lalu yang tidak perlu terulang kembali dan menjadi koreksi bersama di masa yang akan datang.
4. para pihak bersepakat, memperlancar komunikasi dengan membentuk Lembaga komunikasi Antar Suku (LKAS). Lembaga dibentuk mempunyai batas waktu tertentu yang diwakili oleh para pihak, Pemerintah, TNI-POLRI, mediator. Lembaga Komunikasi Antar Suku akan membahas:
 - a. memberikan solusi terhadap permasalahan harta benda pihak yang ditinggalkan di Sambas seperti tanah (bersertifikat) atau hal-hal yang dianggap perlu oleh para pihak.
 - b. mempersiapkan dan mengatur masalah keinginan pihak Madura yang akan berziarah ke makam keluarga yang ditinggalkan di Kabupaten Sambas pada bulan ramadhan dan makam Kesultanan Sambas.
 - c. masyarakat sambas dan Pengeran H. Winata Kusuma memberikan peluang kepada masyarakat Madura untuk datang ke Istana Aztwakoebillah pada hari Raya Idul Fitri dan atau hari-hari tertentu jika mendapat kepastian keamanan dari Pemerintah dan TNI-Polri.
5. apabila para pihak sudah menganggap proses pembauran dengan alamiah sudah berjalan sesuai keinginan para pihak maka lembaga Komunikasi Antar Suku (LKAS) akan membahas pemulangan masyarakat Sambas yang berada di pengungsian dan di lokasi pengungsian secara bertahap sesuai pembicaraan para pihak dengan sistem kenal warga, sistem sisipan, terkontrol, sistem kelakuan baik dan sistem lain yang dianggap perlu, karena: (1) Keturunan Sambas; (2) karena perkawinan; dan (3) karena pegawai negeri sipil/TNI-Polri.
6. untuk menjembatani pencapaian silaturahmi Melayu Sambas dengan madura, pemerintah Kota Singkawang menyediakan lahan untuk Transmigrasi Nasional yang diperuntukkan warga madura keturunan Sambas yang berasal dari pengungsian, pegawai negeri sipil (PNS), dan atau TNI-Polri. Lokasi yang dimaksudkan berada di perbatasan antara Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
7. Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat memfasilitasi komunikasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan kecil atau meluas yang telah disepakati oleh Lembaga Komunikasi Antar Suku (LKAS).

8. pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat menyepakati melakukan program aksi dengan: (1) melakukan pemulihan adat dan budaya para pihak, dari asal adat, tempat kejadian dan atau tempat pengungsian; (2) melakukan pemulihan Mental dan Spiritual kedua belah pihak dari asal adat, tempat kejadian dan atau pengungsian; (3) Melakukan pemulihan pembangunan di lokasi kedua belah pihak dari asal adat tempat kejadian dan atau pengungsian; (4) peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan perekonomian kedua belah pihak; (5) Memperhatikan rumah-rumah di tempat kejadian dan rumah pengungsian dengan peningkatan fasilitas rumah ibadah, kesehatan dan fasilitas pendidikan.⁴⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam penanganan konflik sosial di Kab. Sambas Kalimantan Barat, peran signifikan itu dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai forum dialog, pertemuan antar etnis baik yang digagas oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri melalui *non-governmental organization* (NGO).

Meskipun demikian, keterlibatan tokoh agama dalam penanganan konflik itu masih sangat terbatas pada forum-forum dialog. Hal demikian terjadi akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tokoh agama dalam penanganan konflik. Tokoh agama sesungguhnya bisa berperan lebih jauh jika mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang penanganan konflik.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Ada dua bentuk keterlibatan tokoh agama dalam penanganan konflik sosial di Sambas. *Pertama*, keterlibatan tokoh agama dalam menghentikan atau mengakhiri konflik. Keterlibatan ini dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai pertemuan maupun dialog baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi non-pemerintah. Meskipun demikian, keterlibatan tokoh agama pada tahap pertama ini tidak begitu memiliki kontribusi besar atau signifikan dalam mengakhiri konflik, sebab bagi masyarakat Melayu di Sambas,

⁴⁶ Ibid., h. 148-150

yang memiliki otoritas adalah kerabat kerajaan Sambas dan tokoh adat. *Kedua*, keterlibatan tokoh agama dalam membangun interaksi sosial pascakonflik. Pada tahap kedua ini, peran tokoh agama mulai terlihat menonjol. Membangun kembali interaksi sosial pasca konflik sosial di Sambas bukanlah hal yang mudah, sebab etnis Melayu hingga kini masih sulit menerima dan berinteraksi dengan etnis Madura. Karena itu adalah penting kemudian mendorong kedua etnis untuk melakukan silaturahmi dan dialog.

Akibat trauma yang sangat mendalam, sampai saat ini di kalangan etnik Melayu masih tabu untuk membicarakan kapan etnis Madura bisa kembali ke tanah Sambas. Meskipun mereka sepakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Sambas, tapi mereka masih sangat sulit untuk menerima kembali etnis Madura di tanah Sambas. Bahkan dalam forum silaturahmi dan dialog antara etnis Melayu dan Madura, peserta silaturahmi dan Dialog harus menghindari pembicaraan tentang: (1) pulang ke Sambas; (2) harta-harta benda; (3) budaya; (4) relokasi pengungsi, persoalan dana dan masalahnya; (5) perhatian pemerintah; (6) politik, opini dan praduga-raduga lainnya; (7) hal-hal bersifat emosional.

B. Rekomendasi

Keterlibatan tokoh agama dalam membangun kembali interaksi sosial pasca konflik sosial antara etnis Melayu dan etnis Madura harus terus ditingkatkan. Peningkatan peran itu terutama untuk membangun kesadaran dan saling pengertian kedua etnis untuk melakukan interaksi sosial berdasar pada prinsip-prinsip agama.

Tokoh agama perlu berupaya keras untuk membangun kesadaran etnis Melayu di Sambas agar bisa menerima kembali etnis Madura di Sambas. Di sisi lain, etnis Madura juga perlu merubah sikap dan perilaku mereka jika hendak kembali ke Sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat, dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya perdamaian itu. Misalnya menciptakan *peacemaking-peacebuilding* melalui intervensi-intervensi edukatif dengan menyelenggarakan dialog dan pelatihan. Menata kembali sistem nilai budaya setempat sebagai *social capital* yang mampu menjadi instrumen untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

Daftar Pustaka

Buku

- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Glenn Smith & Helene Bouvier, *Communal Conflict in Kalimantan: Perspectives from the LIPI-CNRS Conflict Studies Program*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, 2006.
- Heru Cahyono, *Resolusi Konflik Etnis di Sambas*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, 2006.
- Lambang Trijono, *Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sri Yanuarti dkk, *Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku* Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Syamsul Hadi dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CireS FISIP UI-Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Zulfydar Zaidar Muchtar, *Mediasi Melayu-Madura: Menelusuri Jejak Perdamaian Sampai Temuan Media Tradisional*. Pontianak: Romeo Mitra Grafika, 2009.

Jurnal

- Agus Sriyanto, "Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal," dalam *Jurnal Ibd'a* Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2007, hal. 286-301.

Dokumen

- Direktorat Jenderal Bisa Kesatuan bangsa Departemen Dalam Negeri, *Buku Panduan Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan*, Batu 1 sampai 3 Pebruari 2002.

Artikel

- Parsudi Suparlan, "Konflik Antar Sukubangsa dan Upaya mengatasinya, Makalah Temu Tokoh Sejarah dengan Generasi Muda, diselenggarakan oleh Badan

pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, 12-14 Juni 2002.

- Tamrin Amal Tamagola, "Anatomi Konflik Kamunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan 1998-2002," Makalah Seminar Nasional Sejarah: *Struktur dan Agensi dalam Sejarah*. Diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI di Depok, tanggal 08 Mei 2003.
- Robert W. Baowollo, "Manajemen Konflik Berbasis Warga," Makalah disampaikan Disampaikan sebagai pengantar diskusi Model-Model Resolusi Konflik Berbasis Karakter Lokalitas yang diselenggarakan oleh Syarikat Indonesia di Pendopo Syarikat Indonesia, Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2009.
- Rusmin Tumanggor, dkk., "Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah konflik Indonesia,"
- Sri Yanuarti, "Penanganan Konflik Sosial di Indonesia," Artikel diskusi bersama Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 13 Mei 2009.
- Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- M. Munandar Sulaiman, "Penanganan Konflik di Indonesia: Masukan untuk Penyusunan Riset Disain, makalah diskusi disampaikan pada diskusi internal bidang kajian Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI, tanggal 15 Mei 2009.
- M. Fadhil Nurdin, "Penanganan Konflik di Indonesia," tanpa keterangan terbitan

Majalah/Surat Kabar

- Tempo*, Edisi 14-20 Agustus 2006, h. 34-35.
D&R, Edisi 3-8 Mei 1999, h. 32-37.

Situs Internet

- Suwandono, "Konflik Poso dan Publik Trust," dalam *Republika Online*, 24 Januari 2006. www.republika.co.id.
- Andi Widjanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik," dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-04.id.html>

Informan

1. Amat Razia, Sekretaris FKPM Kab. Sambas
2. Muhanni Abdur, Tokoh Agama Kab. Sambas
3. H. Tabrani Idris, Tokoh Masyarakat Kab. Sambas
4. H. Darwis Mochtar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kab. Sambas

